

## RINGKASAN

DAMELLA CHANDRA GAYATRI, Progam Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Pertanggungjawaban Administrasi Perdata Dan Pidana Notaris Dalam Kasus Pembantuan Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020). Komisi Pembimbing, Ketua Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. dan Anggota Dr. Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.

Akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris memainkan peran penting dalam transaksi properti di Indonesia. Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari akta kuasa menjual, termasuk memberikan penyuluhan hukum dan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Implikasi hukum juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, seperti syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menyeluruh tidak hanya membahas aspek hukum perdata dan kenotariatan, tetapi juga melibatkan perspektif hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana seseorang yang membantu tindak pidana penipuan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam ranah perdata.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengkaji yang pertama pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana dalam putusan nomor 196/PID.B/2019/PN. DPS, putusan nomor 27/Pid/2019/PT. DPS dan putusan nomor 20/PK/Pid/2020 dan yang kedua pertanggungjawaban administratif, perdata dan pidana notaris dalam putusan nomor 20/PK/Pid/2020. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Spesifikasi penelitian menggunakan analisis preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Analisis data menggunakan analisis normative kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh, mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menegaskan bahwa kesalahan dalam pembuatan akta kuasa menjual merupakan ranah administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga penyelesaiannya tidak melalui jalur pidana, selaras dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020, meskipun Mahkamah Agung menilai kesalahan notaris merupakan kelalaian administratif, peneliti berpendapat bahwa notaris tetap harus bertanggung jawab secara perdata, administratif, dan pidana atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dan perbuatan melawan hukum, demi menegakkan keadilan, menjaga integritas profesi, serta memberikan ganti rugi kepada korban sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata dan UU Jabatan Notaris.

## SUMMARY

*DAMELLA CHANDRA GAYATRI, Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Accountability of Civil and Criminal Administration of Notaries in the Case of Assistance for Criminal Acts (Case Study of Decision Number 20 PK/PID/2020). Supervisory Commission, Chairman Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. and Member Dr. Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.*

*A power of attorney deed made by a notary plays an important role in property transactions in Indonesia. Notaries have a great responsibility in ensuring the validity and legal force of the power of attorney, including providing legal counseling and ensuring compliance with laws and regulations. Legal implications are also closely related to the legal principles of the agreement, such as the requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. Therefore, a thorough study is needed not only to discuss aspects of civil law and notary, but also to involve a criminal law perspective. Therefore, it is important to examine the extent to which someone who assists in the criminal act of fraud can be held accountable in the civil realm*

*The purpose of this study is to analyze and examine the first legal considerations of judges in qualifying criminal acts in decision number 196/PID. B/2019/PN. DPS, decision number 27/Pid/2019/PT. DPS and decision number 20/PK/Pid/2020 and the second is administrative, civil and criminal liability of notaries in decision number 20/PK/Pid/2020. The research method uses normative juridical with legislative, case, and conceptual approaches. The research specification uses prescriptive analysis. The data sources used in this study are primary, secondary, and tertiary. The data collection method uses literature studies. The method of presenting data in the form of narrative text. Data analysis uses qualitative normative analysis.*

*As a result of the research obtained, the Supreme Court in Decision Number 20 PK/Pid/2020 emphasized that errors in the making of a power of attorney to sell are in the administrative realm in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position, so that the settlement is not through criminal channels, in line with the principles of justice and the wisdom of judges as stipulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. In Decision Number 20 PK/Pid/2020, although the Supreme Court considers notary errors to be administrative negligence, the researcher argues that notaries must still be civilly, administratively, and criminally responsible for violations of the principle of prudence and unlawful acts, in order to uphold justice, maintain professional integrity, and provide compensation to victims in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code and the Law on Notary Positions.*